

BAB IV

Bentuk Kebijakan Pemerintah Thailand Mencapai ASEAN Bebas Narkotika 2015

Dalam bab ini penulis akan mendeskripsikan bagaimana upaya pemerintah Thailand dalam menghadapi permasalahan perdagangan narkotika terutama didalam kawasan Negara thailand mengingatkan bahwa terdapat kesepakatan bersama untuk mewujudkan kawasan Asia Tenggara bebas dari narkotika dan obat-obatan terlarang pada tahun 2015. Thailand merupakan salah satu Negara yang masuk dalam *golden triangle* dan Negara sebagai konsumen maupun terbesar di asia. Sehingga menjadikan Thailand sebagai Negara yang sangat berperan penting untuk memberantas para pengedar narkoba.

Thailand menyepakati kesepakatan bersama mengenai kawasan ASEAN bebas Narkotika karena kepentingan Pemerintah Thailand untuk mengatasi perdagangan narkotika di wilayahnya. Negara Thailand tidak hanya mengambil peran sebagai pedangan namun membudidayakan tanaman opium tersebut didalam Negara nya. Sehingga menjadi Thailand sebagai salah satu Negara penghasil obat-obatan terlarang terbesar di Kawasan asia Tenggara. Letak Negara Thailand yang sangat strategis dijadikan sebagai jalur transit untuk menyelundupkan obat-obatan terlarang tersebut ke kawasan Asia Linnya. Hal ini terkait dengan adanya aktifitas perdagangan narkoba di Thailand yang kemudian

disebarkan hasilnya ke Negara-negara lain. Oleh sebab itu, Thailand memiliki kepentingan besar untuk memulai kerjasama tersebut.

Kawasan Asia Tenggara merupakan kawasan yang memiliki tingkat kejahatan transnasional yang cukup tinggi khususnya *drugs trafficking*, dengan adanya program Drug Free ASEAN 2015, Pemerintah Thailand untuk melakukan kerjasama bilateral maupun multilateral untuk mengatur strategi dan kebijakan bersama beberapa Negara dan organisasi internasional yang berkaitan dengan narkoba demi mewujudkan program Drugs Free Asean pada tahun 2015 mendatang. Kawasan Asia Tenggara merupakan kawasan yang memiliki tingkat kejahatan transnasional yang sangat tinggi khususnya dalam penyebaran serta perdagangan narkoba dan obat-obatan terlarang, kejahatan transnasional cenderung marak terjadi di kawasan Asia Tenggara yang memiliki sistem pemerintahan yang korup serta memiliki institusi dan lembaga pemerintahan yang lemah sehingga dapat dipengaruhi oleh para pelaku kejahatan internasional. Faktor inilah yang menyebabkan mengapa kejahatan transnasional marak terjadi di kawasan Asia Tenggara khususnya penyebaran serta perdagangan narkoba dan obat-obatan terlarang.

A. Kerjasama Bilateral

Pemerintah Thailand dalam upaya mencapai ASEAN bebas narkotika tahun 2015 melakukan beberapa upaya untuk menangani masalah perdagangan narkotika dan obat-obatan terlarang. Dengan menjalin kerjasama tentunya

Thailand memiliki kerjasama yang benar-benar memiliki

operasi dan cara lainnya untuk memerangi para pengedar narkotika dan mempertahankan angkatan kepolisian yang modern dan efektif.⁵²

Bantuan yang diberikan Amerika Serikat kepada Pemerintah Thailand dengan mendirikan ILEA (*International Law Enforcement Academy*) yang memiliki perwakilan di setiap negara di Asia Tenggara salah satunya berada di Thailand.⁵³ ILEA didirikan dengan tujuan untuk meningkatkan efektivitas system peradilan pidana melalui kepercayaan publik yang besar terhadap sebuah institusi serta mempromosikan sebuah kerjasama bilateral guna meningkatkan keamanan regional dan stabilitas, dan memperkuat system peradilan pidana di Thailand dalam menangani permasalahan *Transnational Crime* salah satunya adalah perdagangan narkotika dan obat-obatan terlarang.⁵⁴

A.2 China

China merupakan salah satu jalur utama penyebaran narkoba dan obat-obatan terlarang yang diproduksi oleh produsen di Negara Thailand. Dari kawasan inilah narkoba dan obat-obatan terlarang diproduksi dan disebarkan keseluruhan penjuru dunia melalui jalur Yunan, Guang Dong, Hongkong, dan Macao. Untuk menyelesaikan permasalahan produksi obat-obatan terlarang di kawasan *golden triangle*. Karena Thailand merupakan salah satu Negara anggota ASEAN maka ASEAN bekerjasama dengan Negara China yang ditandai dengan deklarasi

⁵² <http://www.state.gov/j/inl/rls/rpt/pbg/fy2013/206685.htm#Thailand> (diakses pada tanggal 10 maret 2014)

⁵³ <http://www.state.gov/j/inl/c/crime/ilea/c11280.htm> (diakses pada tanggal 10 maret 2014)

ACCORD-ASEAN and China Corporative Operation Drugs, yang diselenggarakan di Bangkok pada 11-13 Oktober 2000.

Kerjasama ini meningkatkan wilayah kegiatan ASEAN ke kawasan Asia Timur, khususnya lewat keterlibatan China di dalamnya. Rencana aksi yang dicakup oleh kerjasama regional ini adalah sebagai berikut; 1) pro aktif meningkatkan kesadaran public tentang bahaya naarkotika dan obat-obatan terlarang, 2) memperkuat kepastian hukum dengan memperluas jaringan pengawasan dan meningkatkan kerjasama penegakkan hukum, 3) membangun consensus dengan berbagai pengalaman praktik baik pengurangan permintaan atas obat-obatan terlarang, 4) menghancurkan supply obat-obatan terlarang dengan mendorong program pembangunan alternative dan partisipasi masyarakat dalam pemusnahan tanaman terlarang tersebut.

Kejahatan transnasional di kawasan Asia Tenggara merupakan kejahatan yang harus segera ditangani dan diselesaikan secara hukum, karena dapat mengancam status regional, stabilitas pemerintah, keamanan, sosial dan dapat mengancam stabilitas perekonomian di kawasan Asia Tenggara. Dengan sistem pemerintahan yang korup dan lembaga serta institusi yang lemah para pelaku kejahatan transnasional sangat diuntungkan dengan situasi tersebut dengan cara mempengaruhi pemerintah, institusi kepolisian serta hukum. Mereka dapat membuat negara didalam negara, yang mana seluruh keputusan, kebijakan hukum dan peraturan-peraturan dapat mereka kendal dan laksanakan dengan mudah

Sebagai salah satu Negara anggota ASEAN, Thailand memiliki peran penting dalam terciptanya kawasan Asia Tenggara sebagai zona bebas narkoba tahun 2015. Berdasarkan *ACCORD Plan of Action workshop Study on Achieving Drug-Free 2015 Status and Recommendation* yang diikuti oleh Thailand setidaknya ada beberapa langkah yang harus dilakukan oleh masing-masing negara anggota ASEAN dalam penanganan perdagangan narkoba dan obat-obatan terlarang secara signifikan dan berkelanjutan. Langkah – langkah tersebut meliputi pengurangan dan penghapusan budidaya gelap tanaman narkoba dan obat-obatan terlarang; pengurangan dan penghapusan produksi dan perdagangan gelap narkoba dan obat-obatan terlarang serta tindak kriminal lainnya yang berkaitan dengan narkoba dan obat-obatan terlarang; dan pengurangan dan penghapusan peningkatan penggunaan narkoba.

Kerjasama luar negeri Thailand dalam pemberantasan narkoba dan obat-obatan terlarang dilakukan dengan kerangka sebagai anggota ASEAN maupun sebagai individu negara. Dalam kapasitasnya sebagai salah satu anggota ASEAN, Thailand beserta anggota lainnya membentuk *ASEAN Senior Officials on Drug Matters* (ASOD). Kerjasama Thailand dengan negara anggota ASEAN lainnya dalam kerangka kerja ASOD meliputi beberapa aktivitas seperti pelatihan konseling mengenai narkoba dan obat-obatan terlarang, pemberdayaan pemuda di ASEAN untuk melawan penyalahgunaan narkoba dan obat-obatan terlarang, mempromosikan pencegahan penyalahgunaan narkoba dan obat-obatan terlarang di lingkungan, serta pelatihan terkait penegakan hukum, perawatan, dan

Disamping melakukan kerjasama dengan negara anggota ASEAN lainnya Thailand beserta para anggota ASEAN melakukan kerjasama dengan China dalam pemberantasan narkotika dan obat-obatan terlarang. Pemilihan Cina sebagai rekan kerjasama tidak terlepas dari keyakinan ASEAN, termasuk Thailand, bahwa Cina dapat membantu ASEAN untuk mencapai status Drug-Free pada 2015. Kerjasama antara kedua pihak tersebut disebut sebagai *ASEAN and China Cooperative Operations in Response to Dangerous Drugs (ACCORD)*. Melalui kerjasama ini Thailand, China, beserta negara-negara ASEAN lainnya mendeklarasikan keinginan mereka untuk mewujudkan drug-free ASEAN di tahun 2015.

Selain melakukan kerjasama di dalam kerangka organisasi ASEAN, Thailand sebagai individu negara juga melaksanakan kerjasama dengan negara-negara lainnya, khususnya negara yang selama ini memiliki peran cukup besar terhadap permasalahan narkotika dan obat-obatan terlarang di Thailand, seperti Myanmar, Laos, dan China. Thailand memiliki kerjasama bilateral terkait *Narcotics on Law Enforcement Cooperation* baik dengan Myanmar dan Laos. Kerjasama bilateral antara Thailand dan Laos tersebut membuahkan hasil dengan penyitaan lebih dari 1 juta tablet metamfetamin di perbatasan kedua Negara. Di lain pihak, salah satu capaian penting dari kerjasama bilateral Myanmar – Thailand adalah dengan ditangkapnya Preecha Leamsari, bandar narkotika dan obat-obatan terlarang besar Myanmar, di Thailand yang kemudian diekstradisi ke Myanmar⁵⁵. Lebih lanjut, untuk mendukung Myanmar dalam pemberantasan narkotika dan obat-obatan terlarang menuju Drug-Free ASEAN 2015, Thailand

memberikan bantuan kepada Myanmar sebesar 15 juta Bath.⁵⁶ Melalui pemberian bantuan ini, Thailand berharap dana tersebut dapat membantu Myanmar dalam memberantas budidaya opium. Bantuan lain juga diberikan oleh Thailand sebesar 20 juta Baht kepada Myanmar untuk membangun desa percontohan bebas narkoba dan obat-obatan terlarang di Shan State⁵⁷.

B. Kerjasama Organisasi Internasional

B.1 United Nation

Sejak tahun 1972 Pemerintah Thailand dan PBB telah bekerjasama dalam menanggulangi permasalahan narkoba dan obat-obatan terlarang. Kerjasama tersebut meliputi mengganti tanaman opium dengan tanaman alternative lainnya, program pengembangan dataran tinggi, program pencegahan dan rehabilitasi obat, serta program pengembangan Sumber Daya manusia. PBB telah memberikan dananya sebesar lebih dari 16 juta US\$ selama 30 tahun untuk menerapkan program-program.

Pada tahun 1991 PBB mendirikan kantor UNDCP (*United Nations Drug Control Program*) di Thailand yang berfungsi untuk mengawasi obat yang beredar di Thailand. Thailand dan PBB telah mematuhi protocol sebagai berikut: 1) Konvensi PBB, 2) Konvensi zat psikotropika 1972, 3) konvensi meentang lalu lintas dalam narkoba dan obat-obatan terlarang,

⁵⁶ <http://www.pattayamail.com/news/thailand-contributes-thb15-mil-to-help-myanmar-become-drug-free-10298>, diakses pada tanggal 7 maret 2014

dan 4) Terkait kesepakatan PBB/MOU/perjanjian/pernyataan. Pemerintah Thailand telah berkomitmen untuk memberikan sumbangannya sebesar US\$ 10.000 kepada PBB.

B.2 ASEAN

Negara-negara anggota ASEAN menyatakan tekad kuat untuk mengatasi permasalahan obat-obatan terlarang dengan adanya *ASEAN Declaration of Principles*. Selama periode awal Negara-negara anggota ASEAN berkumpul dan bersama-sama mengeluarkan resolusi dengan proyek-proyek yang konstruktif. Kerjasama ASEAN menjadi lebih konkret ketika Narcotics Desk Officer (NDO) ASEAN didirikan pada tahun 1982. NDO banyak menyelesaikan masalah perdagangan narkoba dan obat-obatan terlarang dan tentu menguntungkan para Negara anggota ASEAN. Pada tahun 1990 adanya restrukturisasi dari sekretariat ASEAN mengakibatkan NDO berubah nama menjadi asisten direktur V. karena keahlian dan pengalaman dalam penegakan hukum, Thailand ditetapkan sebagai Pusat pelatihan penegakan hukum narkoba ASEAN oleh Negara-negara ASEAN. Nomor ASEAN narkoba Hukum Penegakan pelatihan ditahan sebagai berikut: kursus pelatihan penegakan hukum ASEAN (1980-1984), ASEAN kursus pelatihan penegakan hukum, tahap II (1985-1989), ASEAN narkoba penegakan lokakarya dan kursus pelatihan (1989-1991). Selain ASOD malah obat-obatan terlarang diintegrasikan ke

dalam ASEAN untuk bekerjasama dilaksanakan di bawah kerangka kerja

ASEAN Senior Officials (SOMTC). Selain itu kerjasama Thailand dan ASEAN mengenai obat-obatan terlarang disesuaikan di bawah payung ACCORD.

B.3 ICPO (International Criminal Police Organization) / Interpol

Pemerintah Thailand dengan Interpol telah menjalin kerjasama dalam beberapa decade terakhir. Kantor Interpol yang ada di kawasan Asia Tenggara berada di Kepolisian Kerajaan Thailand, Bangkok. Pemerintah Thailand dengan Interpol saling bertukar informasi guna menyelesaikan masalah narkoba. Pertemuan-pertemuan yang diadakan secara rutin oleh Interpol selalu dihadiri oleh delegasi dari Thailand. Pertemuan tersebut membahas bahwa masalah yang terjadi di kawasan Asia Tenggara terutama di Thailand menjadi perhatian yang serius sehingga perlunya dijalin sebuah kerjasama guna tercapainya ASEAN bebas narkoba di tahun 2015.

Pertemuan yang rutin dilakukan oleh Interpol salah satunya adalah pada acara pembukaan Konferensi Kepala Kepolisian ASEAN (ASEANAPOL) ke-33 tanggal 19 Februari 2013 di Pattaya, Thailand, Sekjen INTERPOL menekankan tentang pentingnya peran kerjasama kepolisian internasional antara Asia Tenggara dan INTERPOL dalam memerangi kejahatan perdagangan narkoba⁵⁸.

⁵⁸ <http://www.interpol.go.id/id/media-release/interpol/533-kerjasama-interpol-dan-aseanapol-dalam-lanskap-keamanan> (diakses pada tanggal 20 desember 2014)

B. Tindakan Hukum di Thailand

Terdapat sejumlah undang-undang yang mengatur penggunaan narkotika di Negara Thailand. Meskipun berlakunya *Psychotropic Substances Act B.E. 2518 (1975)*, *Narcotics Control Act B.E. 2519 (1976)* dan *Narcotics Act B.E. 2522 (1979)*. Di dalam undang-undang tersebut mengatur tindakan pada melarang produksi illegal, konsumsi, kepemilikan dan penjualan berbagai macam obat:

- Aturan zat-zat psikotropika yang tercantum didalam *Psychotropic Substances Act B.E. 2518 (1975)* dalam daftar I-IV. Asam Gamma-hydroxybutyric atau (GHB) ditemukan di dalam daftar I. Daftar obat seperti efedrin, midazolam, ketamine, dan pseudoephedrine termasuk dalam daftar II.
- Aturan zat-zat narkotika yang disebutkan dalam daftar I-V dari *Narcotics Act B.E. 2522 (1979)*. Didalam kategori I obat termasuk heroin, amfetamin, metamfetamin (umumnya dikenal sebagai ya baa tau ya ma), ekstasi dan asam lisergat dietilamida (LSD). Daftar II obat yang termasuk di dalamnya adalah daun koka, kokain, kodein, morfingan metadon. Obat dalam kategori V termasuk ganja dan tanaman daun kratom kering. Tindakan ini memberikan polisi dan pihak yang berwenang dalam melakukan pencarian, penyitaan, penangkapan dan polisi memiliki

Berdasarkan *Psychotropic Substances Act B.E. 2518 (1975)*, mengonsumsi dan kepemilikan obat kategori I atau obat-obatan kategori II mendapat hukuman satu sampai lima tahun penjara atau denda sebesar 100.000 sampai 400.000 bath. Produksi, impor, ekspor atau penjualan obat kategori I dan II dihukum dengan hukuman lima sampai dengan dua puluh tahun atau denda sebesar 100.000 sampai 400.000 bath.

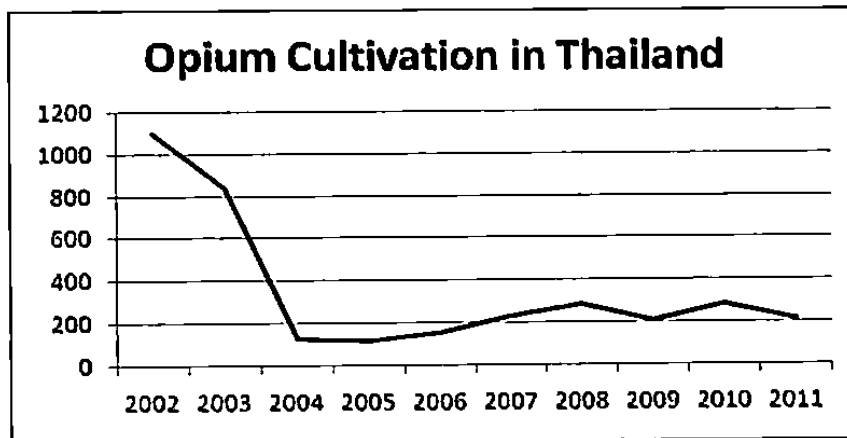
Dibawah undang-undang *Narcotics Act B.E. 2522 (1979)*, mengonsumsi obat kategori I dapat dihukum enam bulan sampai tiga tahun penjara atau denda sebesar 10.000 sampai 60.000 baht. Kepemilikan sampai "dosis terkecil" narkotika kategori I dihukum satu sampai sepuluh tahun penjara atau denda 20.000 sampai 200.000 bath. "Pembuangan" (yaitu perdagangan) atau kepemilikan untuk tujuan pembuangan zat kategori I yang kurang dari dosis terkecil dapat dihukum dengan istilah hukuman penjara dari empat sampai lima belas tahun atau denda 80.000 sampai 300.000 baht; untuk jumlah lebih dari 20g pada zat kategori I. Hukuman yang didapatkan adalah penjara selama empat tahun dan dengan 400.000 sampai lima juta bath; sedangkan untuk obat yang lebih dari 20g kategori I akan dijatuhkan hukuman seumur hidup, serta denda satu juta sampai lima juta bath atau hukuman mati.

Menurut *Narcotics Act B.E. 2522 (1979)*, melakukan produksi, impor atau ekspor narkotika yang terdaftar dalam kategori I (seperti zat jenis heroin, amfetamin) sampai dengan dosis terkecil akan mendapat hukuman empat sampai lima belas tahun penjara atau denda sebesar 80.000 sampai 300.000 bath, ketika

dipimpin oleh *Royal Thai Authorities* dan melibatkan beberapa elemen penegak hukum, seperti *Royal Thai Army, Border Patrol Police, dan Operation Centers for Combating Drugs* di tingkat distrik maupun provinsi. Dalam kurun waktu antara 2002 – 2011, penghapusan ladang opium di kawasan utara Thailand menunjukkan hasil yang signifikan.

Berikut adalah grafik lahan budidaya opium di Thailand dalam kurun waktu 2002 – 2011 :

Grafik 4.1 Lahan Budidaya Opium Thailand 2002 - 2011



Sumber : Office of the Narcotics Control Board, "Thailand Narcotic Control 2011," 49.

Pemberantasan ladang budidaya narkotika dan obat-obatan terlarang di beberapa wilayah Thailand menjadikan para petani setempat yang menggantungkan hidup dari aktivitas budidaya narkotika dan obat-obatan terlarang menjadi kehilangan pekerjaannya. Untuk mencegah para petani tersebut kembali melakukan penanaman narkotika dan obat-obatan terlarang, pemerintah Thailand bekerjasama dengan UNITED NATIONS OFFICE ON DRUGS AND

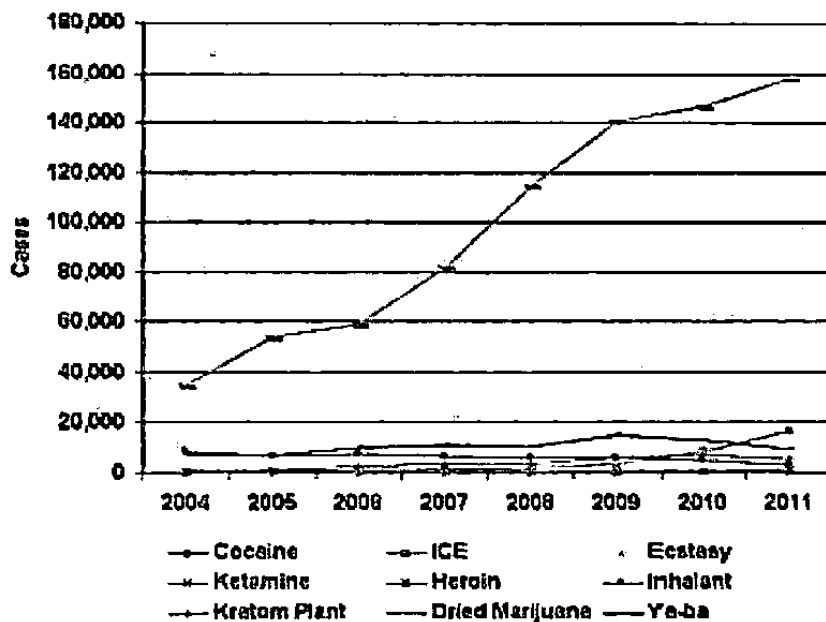
mengurangkan kemiskinan dengan menyediakan mata pencaharian yang berkelanjutan dan legal bagi para mantan petani narkotika dan obat-obatan terlarang. Melalui *Pang Mahan Reforestation Project*, pemerintah Thailand memberikan bantuan kepada para mantan petani narkotika dan obat-obatan terlarang untuk berpindah mata pencaharian dari budidaya opium ke budidaya komoditas yang legal.⁶⁰

Proses menjadikan Thailand sebagai negara yang bebas narkotika dan obat-obatan terlarang menuju Drug-Free ASEAN 2015 tidak hanya dilakukan pemerintah Thailand dengan melakukan operasi pemberantasan lahan budidaya narkotika dan obat-obatan terlarang. Bersama penegak hukum, pemerintah Thailand juga melakukan operasi pengurangan dan penghapusan produksi dan perdagangan gelap narkotika dan obat-obatan terlarang. Antara tahun 2002 hingga 2011, penyitaan dan penangkapan terus dilakukan untuk menekan jumlah peredaran narkotika dan obat-obatan terlarang yang masuk maupun keluar Thailand. Penangkapan dan penyitaan narkotika dan obat-obatan terlarang paling banyak dilakukan terhadap ya-ba. Tingginya permintaan dari pasar narkotika dan obat-obatan terlarang Thailand membuat jumlah ya-ba yang dibawa masuk maupun beredar di Thailand berlangsung dalam skala besar.

<http://www.unodc.org/southeastasiaandpacific/en/2011/12/alternative-development-chiang-mai/story.html>, (diakses pada tanggal 5 maret 2014)

Berikut adalah statistik jumlah kasus narkoba dan obat-obatan terlarang di Thailand selama kurun waktu 2004 – 2011 : **Grafik 4.2 Jumlah Kasus Narkoba dan Obat-obatan Terlarang di Thailand 2004 - 2011**

Statistics on Number of Cases by Narcotic Substances during 2004 – 2011



Sumber : ONBC, "Thailand Narcotic Control 2011," 49.

Pemerintah Thailand berfokus pada pengurangan suplai dan permintaan narkoba dan obat-obatan terlarang kegiatan pengurangan dan penghapusan penggunaan narkoba dilakukan pada kalangan masyarakat. Langkah strategi yang Pemerintah Thailand lakukan terhadap pengurangan suplai narkoba dan obat-obatan terlarang melalui penghapusan dan pengurangan budidaya ilegal serta produksi dan perdagangan gelap narkoba dan obat-obatan terlarang. Sedangkan langkah strategi terhadap pengurangan permintaan narkoba dan obat-obatan terlarang dilakukan melalui beberapa aktivitas pencegahan. Kegiatan pencegahan penggunaan narkoba dan obat-obatan terlarang di kalangan

masyarakat meliputi kampanye anti narkoba dan obat-obatan terlarang; promosi hidup sehat tanpa narkoba dan obat-obatan terlarang; sosialisasi pencegahan narkoba dan obat-obatan terlarang di lingkungan keluarga, sekolah, dan tempat kerja; serta membentuk gerakan pemuda sadar narkoba dan obat-obatan